



SATU TAHUN PERANG DI GAZA: REFLEKSI SEJARAH PENDUDUKAN ISRAEL DI PALESTINA

Prof. Yon Machmudi, Ph.D.

Pidato pada Upacara Pengukuhan Sebagai
Guru Besar Tetap dalam Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia
Depok, 09 Oktober 2024



**SATU TAHUN PERANG DI GAZA:
REFLEKSI SEJARAH PENDUDUKAN ISRAEL DI
PALESTINA**

Prof. Yon Machmudi, Ph.D

Pidato pada Upacara Pengukuhan
Sebagai **Guru Besar Tetap dalam Ilmu
Sejarah** Fakultas Ilmu Pengetahuan
Budaya Universitas Indonesia

Depok, 09 Oktober 2024

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati:

- Bapak Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Indonesia;
- Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia;
- Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia;
- Ketua, Sekretaris, dan Anggota Wali Amanah Universitas Indonesia;
- Para Dekan dan Direktur Sekolah di Lingkungan Universitas Indonesia;
- Dekan, para Wakil Dekan dan seluruh jajaran Pimpinan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia;
- Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia;
- Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia;
- Kolega Dosen dan para Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia;
- Para Guru Besar Tamu,
- Para Undangan Kehormatan
- Kerabat, sahabat, dan seluruh tamu undangan

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas karunia yang telah dilimpahkanNya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pengukuhan saya sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Sejarah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI). Izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan saya yang berjudul “Satu Tahun Perang di Gaza: Refleksi Sejarah Pendudukan Israel di Palestina.”

Hadirin yang saya hormati,

Pada 7 Oktober 2023 dunia dikejutkan dengan serangan yang terjadi wilayah perbatasan Gaza dan Israel. Serangan yang dilakukan oleh Hamas menelan korban hampir 1200 orang Israel dan 250 orang disandera. Tidak lama setelah itu Israel melakukan serangan balasan dan terus berusaha menghancurkan Gaza hingga saat ini. Korban dari rakyat sipil terutama anak-anak dan perempuan dari pihak Palestina terus berjatuhan, fasilitas umum seperti masjid, gereja, sekolah, rumah sakit dihancurkan. Korban dari pihak Palestina yang terbunuh pun telah mencapai 80.000. Benarkah aksi balasan Israel dalam perang yang telah berlangsung satu tahun ini semata-mata sebagai upaya membela diri (the right to defend) dan apakah rakyat Palestina tidak memiliki hak untuk melawan (the right to resist)?

Tidak lama setelah kejadian 7 Oktober 2023 media Israel dan Barat memberitakan sebagai serangan yang paling brutal. Bertebaran informasi mengenai pemenggalan bayi dan korban-korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Hamas. Tidak sedikit dari kepala-kepala negara-negara Barat yang mempercayai informasi yang disampaikan oleh Benyamin Netanyahu dan memberikan simpati

dalam kepada Israel. Namun setelah Israel melakukan serangan balasan secara membabi buta dengan korban puluhan ribu rakyat sipil, fasilitas kesehatan dihancurkan, jutaan rakyat Palestina dipaksa mengungsi dan bantuan kemanusiaan dilarang masuk sehingga menimbulkan bencana kelaparan secara masif, publik mulai mengecam kekejaman Israel. Berita tentang kebrutalan serangan 7 Oktober yang direkayasa itu pun mulai terkuak. Duta Besar Jerman untuk Israel, Steffen Seibert, meminta maaf karena ikut mengedarkan propaganda Israel mengenai pemerkosaan massal yang dilakukan oleh Hamas selama Operasi Banjir al-Aqsa pada 7 Oktober. Propaganda palsu itu gagal saat seorang jurnalis dari Channel 13 Israel berhasil mewawancarai keluarga korban yang diberitakan dan ternyata peristiwa itu tidak pernah terjadi. Tanpa adanya investigasi itu dipastikan Seibert tidak akan pernah meminta maaf karena dia selama ini dikenal sangat aktif menyebarkan berita-berita palsu mengenai serangan 7 Oktober (Planasari 2024).

Di awal kejadian media di Barat hanya terfokus pada kejadian serangan 7 Oktober dan tidak melihat rangkaian peristiwa sebelumnya. Mereka tidak melihat apa yang terjadi sejak berdirinya Israel tahun 1948 dan bagaimana pendudukan Israel Israel hari demi hari terus berlangsung meliputi perampasan tanah, pembunuhan warga sipil, pembatasan mobilitas dan akses terhadap kebutuhan sehari-hari serta praktik apartheid. Tentu tugas sejarawan adalah untuk mengkaji bagaimana peristiwa-peristiwa masa lalu selalu berhubungan dengan peristiwa saat ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Sekjend PBB, Guterres, bahwa peristiwa 7 Oktober bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri (*did not happen in vacuum*).

Dari mana asal muasal konflik ini dimulai dan bagaimana solusi ke depannya? Mengapa kemerdekaan Palestina tidak terwujud dan

pendudukan Israel di Palestina terus berlangsung hingga saat ini? Dalam hal ini saya menawarkan dua pendekatan dalam melihat sejarah perjuangan rakyat Palestina dan pendudukan Israel di Palestina. Pertama berkaitan dengan pendudukan Israel dan fase perjuangan Palestina dan kedua momentum menuju kemerdekaan Palestina. Perang di Gaza yang sudah berjalan selama satu tahun ini tentu tidak lepas dari konflik panjang Israel-Palestina.

Banyak yang berpendapat bahwa konflik Israel-Palestina adalah konflik yang paling panjang dan rumit di dunia. Hampir setengah dari konflik-konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah selalu berhubungan dengan isu Israel-Palestina. Sepertiganya berhubungan dengan hegemoni Amerika Serikat di kawasan dan sepertiganya berkaitan dengan isu regional dan internal negara-negara Arab. Artinya, jika konflik Israel-Palestina ini bisa diselesaikan maka diyakini bahwa setengah lebih dari konflik di kawasan Timur Tengah akan selesai. Jika AS meninggalkan kawasan Timur Tengah maka seperempat konflik juga akan hilang. Sisanya, isu regional dan domestik akan dapat diselesaikan secara internal melalui rekonsiliasi nasional dan kerjasama regional. Jika negara-negara Arab bersatu maka kawasan Timur Tengah akan menjadi kawasan yang stabil, makmur dan demokratis. Mudah bukan?

Pendudukan Israel

Mari kita melakukan refleksi atas persoalan konflik Israel-Palestina dan melihat di mana letak kerumitannya. Jika kita mau berpikir secara obyektif maka sesungguhnya konflik yang dianggap paling rumit ini adalah terang-benderang akar masalah dan solusinya. Persoalannya adalah apakah dunia, terutama negara yang sering disebut sebagai

negara super power atau the great powers itu mau menyelesaikannya. Sebagaimana sering disuarakan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, di setiap forum internasional di PBB bahwa masalah utama adalah soal pendudukan atau dengan bahasa yang lebih jelas yaitu penjajahan. Perbedaan sikap dalam melihat Palestina biasanya terjadi karena perbedaan cara pandang antara mereka yang anti imperialisme dan mereka yang ingin tetap melanggengkannya (Nadine 2017, 20).

Palestina merupakan wilayah yang dijadikan sebagai jajahan setelah Inggris yang dibantu oleh orang-orang Yahudi dan para penguasa lokal Arab pada perang dunia I berhasil mengusir penguasa Kesultanan Turki dari Palestina. Atas nama mandat berdasarkan perjanjian Syke Pecot 1916 antara Inggris dan Perancis, Inggris mulai menduduki Palestina mulai tahun 1923 hingga 1948.

Orang-orang Yahudi dijanjikan rumah nasional (homeland) di Palestina melalui surat tertanggal 2 November 1917 yang ditulis oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour kepada salah satu pemimpin Zionis Yahudi, Lord Rothschild. Sejak 1923 gelombang perpindahan orang-orang Yahudi dari Eropa Timur yang mengalami persekusi antisemisme menuju Palestina semakin besar. Pemukim Yahudi yang awalnya pada 1880 hanya berjumlah 25,000 jiwa (3%), pada 1948 telah mencapai 630,000 (33%). Bentrokan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab kerap terjadi. Demikian pula perlawanan orang-orang Arab dan orang-orang Yahudi Palestina terhadap Inggris juga bertambah besar. Pada 1936-1939 terjadi pemberontakan orang-orang Arab di Palestina terhadap Inggris yang terlalu memberikan keistimewaan orang-orang Yahudi sehingga sebagian besar para petani Arab kehilangan tanah-tanah mereka di

tengah gelombang besar-besaran imigrasi Yahudi (Hughes 2009, 313).

Akibat dari pemberontakan para petani Palestina yang menuntut kemerdekaan maka Penguasa Inggris memberlakukan kebijakan yang disebut dengan the White Paper of 1939 yang berisi 3 langkah kebijakan yaitu memberikan pembatasan kuota bagi orang-orang Yahudi yang datang ke Palestina, pembatasan pembangunan pemukiman baru (settlements) dan penjualan-penjualan tanah kepada orang-orang Yahudi. The White Paper juga mengambil langkah-langkah konstitusi untuk mendirikan sebuah negara di bawah penguasa mayoritas Arab yang melindungi hak-hak minoritas Yahudi. Sayangnya rencana untuk mendirikan satu negara (one state solution) mengalami kegagalan setelah masuknya para imigran Yahudi ilegal, munculnya aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok Yahudi dan penentangan Amerika Serikat yang menginginkan masuknya 100.000 orang-orang Yahudi yang terusir dari Eropa (Apter 2008, 254).

Kegagalan the White Paper membuat Inggris menyerahkan masalah Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Februari 1947. PBB kemudian membentuk komite khusus untuk Palestina disebut U.N. Special Committee on Palestine (UNSCOP), yang bertugas untuk menyelidiki kondisi di Palestina guna mendapatkan solusi tentang masalah Palestina. Pada 29 November 1947, Majelis Umum PBB menyetujui usulan untuk membagi Palestina menjadi negara untuk orang-orang Arab dan Yahudi yang akan diberikan kemerdekaan penuh pada tanggal 1 Oktober 1948. Keputusan yang dikenal dengan Partition Plan 181 ini dianggap menguntungkan pihak Yahudi dan ditentang oleh negara-negara Arab karena memberikan 56% tanah Palestina untuk rencana pendirian negara Yahudi. Orang-

orang Arab mendapatkan Gaza, Tepi Barat dan Yerussalem Timur. Kota tua Yerussalem yang menjadi kota suci tiga agama akan dikelola oleh pemerintahan internasional guna memberikan perlindungan kepada pemenuhan hak tiga agama besar, Islam, Yahudi dan Nasrani. Pada 1944 pemberontakan orang-orang Yahudi makin meluas, dan muncul gerakan terorisme anti Inggris di kalangan mereka. Haganah adalah kelompok milisi Yahudi yang paling besar dan berpengaruh. Contoh lain adalah kelompok paramiliter yang sangat militan, Irgun, dipimpin oleh Menachem Begin, menjalankan aksi-aksi kekerasan terhadap otoritas Inggris dan orang-orang Arab. Aksi pertama yang mereka lakukan adalah melakukan pengeboman terhadap hotel King David di Jerusalem pada 1946. Stern Gang (Lehi), merupakan pecahan dari Irgun dipimpin oleh Avraham Stern kemudian dilanjutkan oleh Yitzhak Shamir. Kelompok ini melakukan berbagai aksi pembunuhan terhadap pegawai-pegawai Inggris di Palestina. Pada 9 April 1948 mereka membakar desa Deir Yasir dan desa-desa lain yang mengakibatkan 750.000 warga Arab Palestina terusir dari desa-desa mereka dan menjadi pengungsi hingga saat ini (Sa'di 2002, 181). Begin sendiri ikut mendirikan partai Likud pada 1973 yang sekarang dipimpin oleh Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Baik Begin dan Shamir juga pernah menjadi Perdana Menteri Israel (Amir 2018, 61).

Pada 14 Mei 1948 negara Israel dideklarasikan. Negara-negara Arab menentangnya dan melancarkan perang terhadap Israel. Dalam perang berikutnya antara Israel dan negara-negara Arab (sebagian besar warga Palestina tidak bersenjata), Israel melakukan pembersihan etnis terhadap hampir 500 kota dan desa Palestina, mengusir lebih dari 750.000 orang (dua pertiga dari warga Palestina). Israel memperluas wilayahnya hingga 78% dari rencana pembagian

wilayah (the partition plan). Israel menolak untuk menarik diri dari wilayah pendudukan baru dan sebuah milisi ekstrimis Israel, Stern Gang (Lehi), membunuh mediator PBB, Count Folke Bernadotte, pada Sep 1948 ketika hendak melakukan negosiasi perbatasan dan mengembalikan para pengungsi Palestina (Bell 1996, 12). Amerika Serikat sendiri cenderung tidak mendukung rencana pembagian wilayah dan kemudian Yordania Yordan menguasai Tepi Barat sementara Mesir mengambil alih Gaza.

Akibat dari pendirian negara Israel menjadikan ratusan ribu warga Arab Palestina menjadi pengungsi. Pada 11 Desember 1948 PBB mengeluarkan Resolusi PBB No 194 yang berbunyi. “Para pengungsi yang ingin kembali ke rumah mereka dan hidup damai dengan tetangga mereka harus diizinkan untuk melakukannya pada tanggal yang paling memungkinkan, dan kompensasi harus dibayarkan untuk properti milik mereka yang memilih untuk tidak kembali dan untuk kehilangan atau kerusakan properti, berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional atau ekuitas, harus diganti oleh Pemerintah atau otoritas yang bertanggung jawab.” Namun resolusi ini tidak pernah ditegakkan.

Pada Juni 1967 terjadi perang 5 hari antara Israel dan negara-negara Arab. Akibatnya lebih dari 300.000 rakyat Palestina dan 200.000 penduduk Suriah terusir. Israel mengambil alih hampir 100% wilayah Palestina termasuk Yerusalem Timur, Tepi Barat, Gaza dan Dataran Tinggi Golan di Suriah serta Semenanjung Sinai di Mesir. Dalam waktu tidak lebih dari dua dekade, Israel berhasil menginvasi wilayah di sekitarnya hingga mencapai 200% dari luas wilayah di awal kemerdekaannya.

Pada Oktober 1973, Suriah dan Mesir melakukan peperangan dengan Israel guna merebut kembali Sinai dan Dataran Tinggi Golan.

Perjanjian Camp David mulai dilakukan pada 1978 dan perjanjian damai antara Israel-mesir pun ditandatangani pada 1979 guna mengembalikan wilayah Sinai kepada Mesir. Setelah melakukan perjanjian damai dengan Mesir, pada 1981 Israel menginvasi wilayah Lebanon Selatan.

Palestina antara Isu Bangsa Arab, Islam dan Kemanusiaan

Sejak dilakukannya perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel melalui Perjanjian Camp David pada November 1978, persoalan Palestina bagi orang-orang Arab telah selesai. Mesir akhirnya dikeluarkan dari organisasi Liga Arab dan kantor pusat Liga Arab dipindahkan dari Mesir ke Tunisia. Ini karena salah satu tujuan dari Liga Arab adalah untuk mencegah berdirinya negara Israel. Pada 1993 Mesir kembali menjadi anggota Liga Arab dan kantor pusatnya dikembalikan ke Mesir.

Pada 1979 terjadi Revolusi Iran yang mengubah kebijakan politik Iran yang awalnya sebagai pendukung Israel dan Amerika menjadi musuh utama mereka. Iran melakukan nasionalisasi aset-aset asing yang menimbulkan permusuhan dengan Amerika dan negara-negara Barat. Sejak itu Iran mendeklarasikan diri sebagai pendukung perjuangan rakyat Palestina. Kedutaan Israel di Iran diganti menjadi kedutaan Palestina. Iran juga menjadikan hari Jumat di akhir bulan Rbamadhan sebagai hari solidaritas Palestina. Pasukan elit al-Quds dibentuk guna mengkordinasikan gerakan perlawanan menentang pengaruh AS dan Israel di Timur Tengah. Sejak itu isu Palestina berpindah dari isu bangsa Arab menjadi isu Islam di bawah kepemimpinan Iran.

Peralihan isu Palestina dari isu bangsa Arab menjadi isu Islam mengubah konstelasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Pada

periode 1948-1979 negara-negara Arab berhadapan dengan negara Israel dan AS menentang pendirian negara Israel sementara Turki dan Iran termasuk dalam negara-negara Muslim yang mengakui dan mendukung Israel.

Pada 1994 Yordania melakukan normalisasi dengan Israel. Beberapa negara Arab kemudian menyusul melakukan normalisasi dengan Israel pada 2020, antara lain; Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko. Puncaknya adalah kesiapan Arab Saudi untuk melakukan normalisasi dengan Israel pada awal tahun 2023.

Sebenarnya, sejak Perjanjian Camp David ditandatangani, persoalan Palestina tidak menjadi perhatian negara-negara Arab walaupun sebenarnya dari awal negara-negara Arab lebih fokus untuk menunjukkan kepemimpinannya menentang pendirian negara Israel dibanding mendorong pendirian negara Palestina. Pada periode ini AS sebagai mediator utama di Timur Tengah berusaha memperluas hegemoninya di kawasan dengan mengesampingkan peran PBB dan tidak tertarik melakukan pendekatan komprehensif dalam menciptakan perdamaian. Pendekatan AS lebih difokuskan pada negosiasi bilateral dengan tujuan secara bertahap untuk menarik negara-negara Arab ke dalam jaringan hubungan yang berpusat di sekitar kekuatan AS dan sekaligus bersahabat dengan Israel (Daniela 2018, 2).

Normalisasi yang difasilitasi oleh AS justru memperkuat dan menjadi legitimasi pendudukan Israel di Palestina. Sejak Israel berhasil melakukan normalisasi dengan Mesir pada 1979, perundingan berkaitan dengan pendirian negara Palestina tidak pernah menjadi agenda serius. Normalisasi Israel dengan negara-negara Arab didorong sementara normalisasi antara Israel dengan rakyat Palestina tidak dilakukan. Penindasan, pembunuhan, perampasan tanah,

pengusiran dan berbagai bentuk praktek apartheid yang dialami oleh rakyat Palestina terus berlangsung di tengah-tengah agenda normalisasi dalam proyek yang disebut “the deal of century.”

Jumlah korban yang terus berjatuhan sejak pendudukan Israel hingga sekarang sering luput dari perhatian publik. Data dari United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) menyebutkan sejak 1 Januari 2008- 2 Oktober 2023, hanya dalam kurun waktu 15 tahun korban rakyat Palestina yang terbunuh di wilayah pendudukan sebanyak 6.408 dan yang terluka sebanyak 152.232 (Ocha 2024). Data yang direkam hanya data yang dilaporkan secara resmi dan diverifikasi oleh staff OCHA di lapangan, 15 tahun sebelum kejadian serangan 7 Oktober. Tentu data rakyat Palestina yang terbunuh dan terluka apabila diteliti jauh ke belakang sampai sejak berdirinya Israel akan jauh lebih banyak.

Gaza dijadikan sebagai wilayah yang terisolasi, ditutup aksesnya dari dunia luar dan dijadikan sebagai penjara terbuka terbesar di dunia (Ilana 2015, 12-14). Puncaknya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu dalam pidatonya di depan Majelis Umum PBB pada September 2023 memperlihatkan peta kawasan Timur Tengah yang memasukkan wilayah Gaza dan Tepi Barat ke dalam Israel (Ferida 2023).

Peristiwa 7 Oktober secara mendadak mengubah konstelasi regional di Timur Tengah. Publik di Eropa dan Amerika yang awalnya fokus pada peristiwa 7 Oktober kemudian mulai tersadarkan tentang banyaknya kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel di wilayah pendudukan. Jumlah korban tewas rakyat Palestina mencapai 41.495 jiwa sebagian besar adalah warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak. Kondisi Gaza semakin memburuk dan korban terus berjatuhan baik karena senjata berat maupun blokade bantuan

kemanusiaan baik makanan maupun obat-obatan. Kondisi Rakyat Palestina yang awalnya dianggap baik-baik saja perlahan terbuka ke publik dunia bahwa sesungguhnya telah terjadi penjajahan berkepanjangan yang nyaris dilupakan. Kini, simpati publik dunia kepada perjuangan rakyat Palestina semakin meluas karena logika penjajahan sulit untuk bisa diterima..

Peristiwa perang di Gaza yang sudah berjalan 1 tahun ini membuka ingatan publik tentang betapa banyaknya kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel di wilayah pendudukan. Demo besar-besaran yang melibatkan ratusan ribu pengunjung rasa di negara-negara yang secara politik tidak mendukung pendirian negara Palestina mulai bermunculan. Para pemimpin dunia yang awalnya mendukung Israel pun mulai berubah sikap. Beberapa negara di Eropa seperti Spanyol, Norwegia, Belgia dan Slovenia mulai mengakui Palestina sebagai negara. Pada saat Benyamin Netanyahu berpidato dalam Sidang Umum PBB, 22 September 2024, setengah dari delegasi yang hadir keluar ruang sidang.

Pada akhirnya, dukungan terhadap two state solution semakin menguat, padahal sejak dimulainya agenda perdamaian Israel dengan negara-negara Arab pada 1978 sampai terjadinya serangan 7 Oktober 2024 aspirasi kemerdekaan Palestina nyaris tidak pernah dibicarakan. Ironinya, perdamaian dan normalisasi dengan negara-negara Arab dan dunia Islam terus diupayakan tetapi anehnya justru upaya perdamaian antara Israel dan rakyat Palestina tidak dilakukan. Dalam melihat konflik panjang antara Israel dan Palestina seharusnya agenda utama adalah normalisasi antara Israel dan Rakyat Palestina bukan sebaliknya normalisasi dengan negara-negara di luar Palestina. Jika normalisasi antara negara-negara Arab dan Muslim dilakukan di saat

hubungan antara Israel dan Rakyat Palestina sendiri dalam kondisi abnormal maka yang terjadi justru adalah program abnormalisasi.

Beberapa keputusan penting lembaga-lembaga internasional memberikan dukungan terhadap rakyat Palestina. Pada 26 Januari 2024 Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan agar Israel melakukan tindakan secepatnya untuk menghentikan genosida. Dewan Keamanan PBB pada bulan Maret 2024 mengeluarkan sebuah Resolusi No. 2728 yang menyerukan gencatan senjata guna membuka koridor kemanusiaan. Pada 19 Juli 2024 Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) mengeluarkan keputusan yang menegaskan bahwa penjajahan Israel di tanah Palestina selama berpuluh-puluh tahun adalah tidak sah (ilegal) dan harus segera disudahi.

Atas dasar rekomendasi dari Mahkamah Internasional pada 18 September 2024 Majelis Umum PBB mengeluarkan sebuah resolusi untuk mengakhiri impunitas Israel. Keputusan itu mengharuskan Israel meninggalkan wilayah pendudukan selambat-lambatnya satu tahun ke depan. Apakah semua resolusi yang dikeluarkan oleh PBB bisa dijalankan? Nampaknya, resolusi-resolusi PBB yang dimaksudkan menjadi upaya conflict resolution telah menjadi conflict no solution. Resolusi-resolusi PBB berkaitan dengan pendudukan Israel tidak pernah secara serius diimplementasikan menjadikan masalah yang sebenarnya sederhana terus berkembang menjadi semakin rumit (Adams 1988, 71).

Momentum Kemerdekaan Palestina

Pemberontakan petani Palestina 1936-1939 ternyata tidak berkembang menjadi gerakan kemerdekaan yang masif dan berujung

pada proklamasi kemerdekaan setelah hengkangnya Inggris dari Palestina. Orang-orang Yahudi memanfaatkan mundurnya Inggris untuk mendeklarasikan kemerdekaan dan merebut wilayah-wilayah baru dengan berperang melawan negara-negara Arab dan mengusir orang-orang Arab di Palestina. Sebaliknya, orang-orang Arab di Palestina tidak menggunakan momentum itu untuk memerdekakan diri karena mempercayakan kemerdekaannya kepada negara-negara Arab. Saat orang-orang Yahudi mendirikan negara Israel justru orang-orang Arab di Palestina terusir dari negerinya. Dalam fase ini, rakyat Palestina kehilangan momentum untuk merdeka.

Baru pada 1964 organisasi perlawanan untuk kemerdekaan Palestina, Palestine Liberation Organization (PLO) yang terdiri dari faksi Fatah (est. 1959) dan PFLP serta faksi-faksi perlawanan lainnya. Mereka menguasai wilayah Tepi Barat. Pada 1987 organisasi perlawanan Islam, *Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah*, (Hamas) berdiri dan mengontrol wilayah Gaza. Sejak itu perlawanan terhadap Israel semakin menguat ditandai dengan gerakan intifada yang berlangsung pada 1987-91 (ends with the Madrid Conference. Pada 15 November 1988 Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di pengasingan mendeklarasikan kemerdekaan Palestina di Aljazair.

Pada 30 Oktober hingga 1 November 1991 AS dan Uni Soviet menjadi sponsor Konferensi Madrid guna mencari solusi terhadap permasalahan di Palestina. Pertemuan ini dihadiri oleh negara-negara Arab seperti Yordania, Lebanon, Suriah dan Mesir tetapi tidak ada utusan dari kelompok perlawanan Palestina karena Israel menolak bernegosiasi dengan mereka. Pada akhirnya Konferensi Madrid melahirkan piagam perdamaian antara Israel dan Yordania pada 1994. Mengingat makin meluasnya gerakan perlawanan rakyat Palestina dan setiap upaya perdamaian yang diinisiasi oleh AS tidak pernah

menyentuh kepentingan rakyat Palestina maka diadakanlah upaya perdamaian yang dikenal dengan Perjanjian Oslo I pada 13 September 1993 dan Oslo II pada September 1995. Dalam kedua perundingan ini pihak Palestina secara resmi diwakili oleh PLO setelah Pemerintah Israel tidak lagi menyebutnya sebagai organisasi teroris. PLO bersedia untuk menghentikan perlawanan dan melakukan demiliterasi setelah mendapatkan janji kemerdekaan dari Israel (Lustick 1997, 66).

Sayangnya demiliterisasi pejuang Palestina sudah dilakukan sebelum janji kemerdekaan itu direalisasikan. Sekali lagi kesempatan untuk mendapatkan kemerdekaan dan perdamaian hanya tinggal mimpi karena Perdana Menteri Israel, Yitzak Rabin yang menandatangani kesepakatan damai dengan Palestina harus meregang nyawa di tangan kelompok Yahudi ekstrimis pada 1995. Akibatnya hingga sekarang pun mimpi kemerdekaan itu tidak pernah terealisasi karena kelompok Yahudi ekstrim kembali berkuasa.

Gerakan perlawanan terus dilanjutkan oleh Hamas yang menguasai Gaza. Hamas yang mulai menempuh jalan diplomasi dan perjuangan politik pada akhirnya harus kembali kepada jalur perlawanan setelah kemenangannya dalam Pemilu 2006 di Palestina dibatalkan. Pada bulan Juni 2007, Israel menerapkan blokade darat, udara dan laut di Jalur Gaza serta membatasi setiap pasokan barang dan obat-obatan ke Gaza. Kehidupan di Gaza secara keseluruhan ditopang melalui bantuan kemanusiaan dari negara-negara donor.

Dalam kondisi yang sangat sulit itu gerakan-gerakan perlawanan terus dilakukan di Gaza. Puncaknya adalah serangan 7 Oktober 2023 yang secara tidak langsung mengubah posisi Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Simpati publik dunia kepada Palestina pun makin meluas sementara negara-negara yang awalnya tidak optimis dengan kemerdekaan Palestina mulai membicarakan

kembali tentang two state solution sebagai satu-satunya cara menyelesaikan konflik berkepanjangan ini (Cahyani 2024). Gaza telah menciptakan momentum baru, membuka ruang untuk renegosiasi kemerdekaan bagi rakyat Palestina dan tugas dunia internasional memastikan terpenuhinya keadilan bagi rakyat Palestina agar terbebas dari penjajahan.

Kesimpulan

Momentum perjuangan Palestina yang telah mendapatkan simpati dunia internasional tentu harus dipertahankan guna dapat mengantarkan pada two state solution. Kunci utama penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel adalah menjadikan isu rakyat Palestina sebagai isu kemanusiaan berkaitan dengan pendudukan.

Resolusi DK PBB No. 2735 Tahun 2024 yang meminta untuk diberlakukan gencatan senjata di Gaza harus dijadikan pijakan untuk segera diimplementasikan, Keputusan Mahkamah Internasional yang menyebutkan bahwa pendudukan Israel di Palestina adalah tidak sah (ilegal) yang diperkuat dengan Resolusi PBB 18 September 2024 meminta Israel meninggalkan wilayah pendudukan paling lambat dalam waktu 1 tahun ke depan harus didorong agar dapat segera direalisasikan dengan dukungan negara-negara besar (the great powers). Hanya dengan penarikan diri Israel dari wilayah pendudukan, negara Palestina dapat didirikan berdampingan secara damai dengan negara Israel (Machmudi 2024).

Pemerintahan Palestina yang akan dibentuk yang merupakan bagian dari two state solution harus dapat mengadopsi pendekatan inklusif dengan memperhatikan aspirasi rakyat Palestina secara keseluruhan. Pendekatan yang berdasarkan pada kecenderungan like dan dislike

terbukti gagal dalam membentuk stabilitas politik bahkan cenderung melahirkan perang saudara. Ini bisa dilihat dari kegagalan AS dan negara-negara Eropa dalam membentuk pemerintahan boneka di Afghanistan. Palestina tidak boleh mengulang kegagalan itu hanya karena tekanan dari AS dan Israel. Nasib Palestina terletak di tangan rakyatnya sendiri bukan ditentukan oleh aktor-aktor luar. Konflik Israel Palestina harus dapat ditransformasikan menjadi semangat perdamaian guna membangun jembatan peradaban yang inklusif dan bukan tembok pemisah yang eksklusif. Tugas sejarawan adalah memandu masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu sehingga dapat menjadikan konflik di masa lalu sebagai pelajaran sehingga bisa bertransformasi menuju perdamaian abadi, koeksistensi hidup berdampingan dalam harmoni.

Bapak, Ibu, Hadirin yang saya hormati,
Pada hakekatnya, capaian sebagai guru besar bukanlah akhir tetapi awal untuk terus berkomitmen mengabdikan diri di dunia pendidikan sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara. Tentu, capaian ini bukanlah semata-mata karena usaha yang dilakukan tetapi tentu karena karunia dari Allah SWT. Peran dan kontribusi dari semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, jasa-jasa mereka kepada saya adalah bagian penting dari diberikannya hak kepada saya untuk menyandang gelar profesor.

Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada kedua orang tua saya Almarhum Bapak Yasin Mansyur dan Almarhumah Ibu Barokah Yasin atas segala pengorbanannya terutama selama saya masih menjalani kuliah S1 sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia. Ayah saya di usia senjanya pada tahun 1992 rela berpayah-payah mengantarkan saya ke Jakarta naik ekonomi Gaya Baru Selatan

walaupun tidak mendapatkan tempat duduk. Terima kasih saya sampaikan kepada mertua saya almarhum KH. Dimyathi Romly dan Ibu Nyai Muflichah Marzuqi yang telah memberikan dukungan terhadap perjalanan rumah tangga kami sebagai seorang akademisi. Beliau berdua telah mengikhlaskan putrinya menjadi pendamping hidup saya walaupun status saya pada waktu itu sebagai asisten dosen tidak tetap, kadang tetap asisten kadang tidak.

Kepada kakak-kakak dan ipar-ipar saya, kakak-kakak dan adik-adik ipar saya dari istri, saya ucapkan banyak terima kasih. Ahmad Baidhowi Yasin (Alm), Muhammad Munif, Ahmad Mustain, Niswatin (almh), Is'adah, Masrur (alm), Siti Marifah, Yusmiati (almh), Masruroh, Agus Ali Fauzi, Habib Wijaya dan Maria Ulfah, semoga kerelaan kakak-kakak memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan kuliah mendapatkan balasan dari Allah SWT. Terima kasih kepada keluarga besar Bani Mansyur, Bani Dimyathi Romly dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Darul Ulum yang berkenan hadir dalam acara pengukuhan guru besar saya.

Momen saya berdiri di sini untuk acara pengukuhan guru besar tentu tidak akan terjadi tanpa peran serta dari istri tercinta, Soraya Dimyathi, ST, M.Hum dan anak-anak tersayang yaitu Muhammad Hakan Enayata, Hilwa Taqiyya, Tazkia Hammada, Tazhada Hashifa dan Ahmad Hazim Najata. Terkhusus untuk istri tercinta terima kasih atas kesabaran dan dukungan dalam membina keluarga dan mendidik anak-anak, yang selalu meyakinkan bahwa setiap peristiwa pasti ada hikmah dan kebaikan di dalamnya saat kita menjalani ketentuanNya,

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang telah memutuskan saya sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu

Sejarah. Rektor Universitas Indonesia: Prof. Dr. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. bersama seluruh jajaran Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas yang selalu memberikan dukungan kepada civitas akademika UI untuk untuk berkarya dan berkontribusi. Kepada Ketua Dewan Guru Besar UI: Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH, M.A., Ph.D., dan Sekretaris DGB UI: Prof. Dr. drg. Indang Trihandini, M.Kes., dan seluruh Anggota DGB UI. Kepada Ketua dan Sekretaris dan Sekretaris Senat UI serta para anggotanya, saya ucapkan beribu terima kasih atas dukungan beliau-beliau dalam capaian guru besar saya ini. Juga untuk Ketua Senat UI Periode (2019–2024), Prof. Nahrowi, Ph.D. dan para anggotanya saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya dalam pengusulan GB saya. Terima kasih saya juga untuk Tim Penilai Angka Kredit UI yang diketuai oleh Prof. Drs. Heru Suhartanto, M.Sc., Ph.D., dan seluruh anggota atas dedikasinya yang tak kenal lelah.

Terima kasih kepada Ketua dan Sekretaris DGB FIB UI, Prof. Dr. Titik Pudjiastuti, S.S., M.Hum dan Prof. Dr. R. Tuty Nur Mutia serta para anggota, Prof. Dr. Agus Aris Munandar, S.S., M.Hum, Prof. Dr. R. Cecep Eka Permana, Prof. Dr. Maman Lesmana, Prof. Dr. M.I. Djoko Marihandono, Prof. Dr. Melani Budianta, Prof. Dr. Multamia RMT Lauder, Prof. Dr. Bambang Wibawarta, Prof. Dr. Irmawati Marwoto, Prof. Dr. Lilawati Kurnia, Prof. Dr. Muhammad Luthfi, Prof. Dr. A.M. Hermina Sutami, Prof. Dr Manneke Budiman, Prof. Dr. Zeffry, Prof. Dr. Mina Elfira, Prof. Dr. phil. M. Julita Setiawati Darmojuwono dan Prof. Dr. Susanto Zuhdi. Kepada Ketua dan Sekretaris Senat Akademik FIB UI, Dr. Fuad Gani dan Dr. Agus Setiawan, serta seluruh anggotanya terima kasih banyak atas pengabdianya.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum., beserta Wakil Dekan I, Dr. Untung Yuwono, S.S., Wakil Dekan II, Dr. Taufik Asmiyanto, M.Si. yang telah mendukung proses pengusulan GB saya hingga acara pengukuhan hari ini. Terima kasih juga kepada Direktur dan Wakil Direktur SKSG UI, Dr. Athor Subroto dan Dr. Eva Achjani Zulfa.

Terima kasih kepada Manajer SDM FIB UI, Ibu Dr. Tamara Adriana Salim bersama seluruh staf lainnya yang telah memberi dukungan luar biasa untuk persiapan pengukuhan guru besar saya. kepada pihak SDM UI, yang secara teliti mempersiapkan dan memeriksa berkas-berkas usulan saya sehingga usulan guru besar dapat disetujui.

Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih khusus untuk teman-teman di Prodi Arab FIB UI., Prof. Muhammad Luthfi, Prof. Maman Lesmana, Dr. Basuni Imamudin, Dr. Bastian Zulyeno, Dr. Apipudin, Dr. Ade Solihat, Siti Rahma Soekarba, M.Hum, Wiwin Triwinarti, MA, Suranta, M.Hum, Gina Najah, M.Hum, Letmiros, M.Hum, MA, Muhammad Zulifan, MA. Juga para dosen Prodi Arab yang sudah purnabakti alm Dr. Purwadaksi, alm Dr. Zaenudin, Aliudin Mahyudin, M.A., Dr. Juhdi Syarif, Dr. Fauzan Muslim dan Aselih Asmawi, M.SI. Terima kasih juga kepada teman-teman dosen di Departemen Ilmu Sejarah khususnya, Dr. Didik Prajoko Dr. Abdurahman, Dr. Linda Sunarti, dan semua senior maupun junior saya, semoga tetap produktif dan optimis untuk meraih jabatan akademik yang tertinggi. Terima kasih kepada pimpinan dan jajaran Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang telah memberi kepercayaan kepada saya ikut berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik dalam dalam kegiatan mengajar, membimbing dan menguji.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru saya dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi. Mereka memiliki kontribusi yang tidak bisa dihitung besarnya karena atas jasa-jasa beliau saya dapat meraih jabatan akademik saat ini.

Terima kasih juga kepada teman-teman peneliti dan para mahasiswa baik di jenjang S1 prodi Arab FIB maupun di jenjang S2 di prodi Kajian Timur Tengah dan Islam SKSG UI. Para alumni UI yang terlibat dengan penelitian-penelitian yang saya lakukan, Frial Ramadhan, Riyan Hidayat, Syahri Helmi Zacky dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Tim Humas dan Panitia pengukuhan dari Rektorat UI, FIB UI, dan FEB UI yang sangat kompak dalam mengurus acara pengukuhan kami hari ini. Terima kasih atas kerjasama seluruh sivitas FIB UI mulai dari petugas gedung, satpam, sampai para staf tendik serta rekan-rekan dosen dari berbagai program studi di FIB UI.

Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada pihak ataupun nama yang tidak saya sebutkan. Mereka semua adalah orang-orang yang istimewa bagi saya yang selalu hadir dalam menebar kebaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang bersedia hadir di sini dan tentunya saya juga mengucapkan selamat kepada kolega saya Prof. Dr. Ir. Mahjus Ekananda, M.S.E., M.M., yang telah bekerjasama dengan sangat baik untuk menyukseskan acara pengukuhan kami berdua.

Akhir kata, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, senantiasa memberikan kebaikan dan melindungi segala aktifitas kita, aamiin ya Rabbal alaamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Daftar Acuan

Adams, Michael. (1988). "What Went Wrong in Palestine?" *Journal of Palestine Studies*, Vol. 18, No. 1, Special Issue: Palestine 1948, pp. 71-82

Bell, J. Bowyer (1996). *Terror Out Of Zion*. New York: Transaction.

Cahyani, Dewi Rina. (2024). *Negara Muslim dan Eropa Berkumpul di Spanyol, Bahas Pembentukan Negara Palestina*. Tempo, 14 September.

Ocha. (2024). "Data on casualties." Ocha website, 2024. <https://www.ochaopt.org/data/casualties>

Feldman, Ilana. (2015). "Gaza as an Open-Air Prison". *Middle East Report*, No. 275, pp. 12-14.

Ferida, Kharisa. (2023). "PM Israel Benjamin Netanyahu Usung Peta Timur Tengah Tanpa Palestina Saat Pidato di Majelis Umum PBB." *Liputan 6*. 23 September 2023. <https://www.liputan6.com/global/read/5405164/pm-israel-benjamin-netanyahu-usung-peta-timur-tengah-tanpa-palestina-saat-pidato-di-majelis-umum-pbb>

Goldstein, Amir. (2018). "Half-heartedly: Menachem Begin and the establishment of the Likud Party." *Middle Eastern Studies*, Vol. 53, No. 5, pp. 61-78

Huber, Daniela. (2018). "Forty Years of Camp David, Forty Years Without Peace." *Istituto Affari Internazionali*, Vol 18. 15 September.

Hughes, Matthew.(2009). "The Banality of Brutality: British Armed Forces and the Repression of the Arab Revolt in Palestine, 1936-39." *The English Historical Review*, Vol. 124, No. 507, pp. 313-530.

Lavy, Victor. (1984). "The Economic Embargo of Egypt by Arab States: Myth and Reality." *Middle East Journal*, Vol. 38, No. 3, pp. 419-432

Lustick, Ian S. (1997). "The Oslo Agreement as an Obstacle to Peace." *Journal of Palestine Studies*, Vol. 27, No. 1, pp. 61-66.

Machmudi, Yon. (2024). "What Can Indonesia Learn from Qatar's Experience in Mediating Conflicts in the Middle East?" *Georgetown Journal of International Affairs*, 29 April.

Naber, Nadine. (2017). "The U.S. and Israel Make the Connections for Us: Anti-Imperialism and Black-Palestinian Solidarity." *Critical Ethnic Studies*, Vol. 3, No. 2 (Fall 2017), pp. 15-30.

Planasari, Sita. (2024). "Dubes Jerman untuk Israel Akui Sebarkan Kebohongan Soal Saksi Pemerkosaan Massal pada 7 Oktober." *Tempo*, 1 September.

Sa'di, Ahmad H. (2002). "Catastrophe, Memory and Identity: Al-Nakbah as a Component of Palestinian Identity." *Israel Studies*, Vol. 7, No. 2, pp. 175-198.

Teibel, Ami. (2023). "UN chief's comment that Hamas attack 'did not happen in a vacuum' outrages Israeli officials." *Fortune*, 25 Oktober. <https://fortune.com/2023/10/25/un-secretary-general-says-hamas-attack-did-not-happen-in-vacuum-guterres-israel/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Prof. Yon Machmudi, S.S., Ph.D.
NIP : 0609050357
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat 1/IVb
TTL : Jombang, 17 September 1973
Agama : Islam
Nama Istri : Soraya Dimyathi

Nama Anak/Menantu :

1. Muhammad Hakan Enayata
2. Hilwa Taqiyya
3. Tazkia Hammada
4. Tazhada Hashifa
5. Ahmad Hazim Najata

Pendidikan Formal:

1992– 1997	S1 Sastra Arab UI
1997-1999	S2 Islamic Studies, Joint Program Howard University-School of Islamic and Social Sciences, Virginia, AS
2002-2007	S3 Leading to Ph.D Asian Studies, Australian National University

Riwayat Jabatan

Jabatan Fungsional

1 April 2009	Pengajar Tetap UI BHMN
1 Oktober 2011	Lektor (282)
1 November 2019	Lektor Kepala (552.5)
1 Maret 2024	Guru Besar (889)

Jabatan Struktural

2015 – 2017	Sekretaris Departemen Sejarah FIB UI
2017 – 2025	Kaprodi Kajian Timur Tengah dan Islam SKSG UI
2020 – 2025	Anggota Komite Sekolah Kajian Strategik dan Global UI

Karya Tulis Terbaru:

Yon Machmudi. (2024). “The Baweanese diasporic tradition and its role in spreading the tarekat in Singapore”, *Cogent Arts and Humanities*, Vol. 11, No. 1, Februari, pp 230-318. (Scopus Q2).

Yon Machmudi, Abdurakhman, Wildan Insan Fauzi,. (2024). “Forging Progress: Scientists and Engineers Shaping the Dutch East Indies Transformation, 1778-1942.” *Paramita: Historical Studies Journal*, Vol 34, No. 1.

Wildan Insan Fauzi, **Yon Machmudi**, Abdurakhman. (2024). “Being Needed but Hated: The Exodus of Dutch Scientists in Indonesia, 1945–1959.” *Kemanusiaan*, Vol. 31, No. 1, pp. 41–62. (Scopus Q2).

Yon Machmudi. (2024). “What Can Indonesia Learn from Qatar’s Experience in Mediating Conflicts in the Middle East?” *Georgetown Journal of International Affairs*, 29 April.

Alhamra Azhari, **Yon Machmudi**. (2024). The Qadian Ahmadiyah in Riau: History, Existence, and Development in the 20th Century.” *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol 12, No 2

Yang Yani, **Yon Machmudi**, Muhammad Syaroni Rofi’i. (2023). “Indonesia's "Great Power Balance" Diplomacy in Foreign Relations: Constructing a Balanced Relationship with the United States and China.” *Croatian International Relations Review*, Vol. 29 No. 93.

Yon Machmudi, Frial Ramadhan Supratman. (2023). Islam, Modern Turkey, and a Javanese Intellectual: The Sutomo's Visit to Turkey in 1937, *Studia Islamika*, Vol. 30, No. 2, pp. 291–318. (Scopus Q1).

Ahmad Baihaqi Maskum, **Yon Machmudi**. (2023). “Masa Depan Demokrasi Mesir Pasca-Arab Spring.” Jurnal ICMES, Vol 7 No 1.

Yang Yani, **Yon Machmudi**. (2023). China-Indonesia Maritime Cooperation from the Perspective of Constructivism. JURNAL KEAMANAN NASIONAL, Vol 9 No 2.

Afif Notodewo, **Yon Machmudi**. (2022). “Analisis Normalisasi Hubungan Arab Saudi dengan Qatar Tahun 2021.” Jurnal Ilmu Sosial Indonesia, Vol. 3, No. 2.

Nadiya Azahra Hidayat, **Yon Machmudi**, Siti Rohmah Soekarba. (2022). “VISION 2030: SAUDI ARABIA’S MODERNIZATION.” Jurnal CMES, Vol 15, No 2.

Putri Padmi Nurwijayati, **Yon Machmudi**. (2022). “Pragmatisme Kebijakan Luar Negeri Mesir dalam Menyikapi Konflik Rusia-Ukraina. The Journal of Middle East Studies, Vol 6 No 2.

Fahrudin Alwi, **Yon Machmudi**. (2022). “Moderation of The Islamic Movement in Peace Implementation between The Government of The Republic of The Philippines and The Moro Nation in The South Philippines.” Journal Middle East and Islamic Studies, Vol. 9, No. 2.

Kresna Kusumawijaya, **Yon Machmudi**. (2022). “Qatar Foreign Policy in Middle East Conflict Mediation.” Journal Middle East and Islamic Studies, Vol. 9, No. 2.

Yon Machmudi, Frial Ramadhan Supratman, Mehmet Ozay. (2021). “Turkish Laicism in Indonesia's Newspapers (1920-1940) and Its Influence on Indonesian Secularists and Muslims Thoughts”, *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 15, No. 1, Juni, pp 1-20. (Scopus Q1).

Yon Machmudi. (2021). “The Re-emergence of the Indonesian Islamic State Groups: Their Survival and Modus Operandi”, *International Journal of Islam in Asia*, Vol. 1, No. 2, Maret, pp. 211-232. (Scopus no Q).

Yon Machmudi. (2021). “Modernization and Changes in Kiai-Santri Relations in Three Pesantrens in Java.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16 No. 1.

Yon Machmudi. (2021). “Lebanon: Legitimacy and Competition of Lebanese Armed Forces Versus Hezbollah.” *Jurnal ICMES: The Journal of Middle East Studies*, Vol 5 No 2.

Harisuda Murdani, **Yon Machmudi**. (2021). “Peran dan Kepentingan North Atlantic Treaty Organization (NATO) Dalam Konflik Perang Sipil di Libya: Studi Kasus Periode Tahun 2011-2015.” *Journal Middle East and Islamic Studies*, Vol. 8, No. 2.

Fadlur Rifki Afif, **Yon Machmudi**. (2021). “Ancaman Keamanan Atas Investasi China di Israel.” *Journal Middle East and Islamic Studies*, Vol. 8, No. 1.

Yon Machmudi. (2020). “SAUDI ARABIA INTERNAL CHANGES AND ITS FOREIGN POLICIES IN RESPONDING THE ARAB SPRING.” *International Review of Humanities Studies* Vol. 5, No.1.

Yon Machmudi, Putih Kusumah Ardhani. (2020). “The Role of Women in Islamic Propagation: A Case Study of Tablighi Jamaat’s Nyai of Pesantren Al-Fatah, East Java, Indonesia.” *Journal of Asian Social Sciences Research*, Vol. 2 No. 2.

Iranti Mantasari, **Yon Machmudi.** (2020). Strategi Devide et Impera oleh Amerika Serikat dalam Konflik di Suriah (2011-2018). *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol 7, No 1.

Muchammad Chasif Ascha, **Yon Machmudi.** (2020). Dinamika Hubungan antar Kelompok Kurdi dalam Pendekatan Konstruktivisme. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol 6, No 2.

